

BROADCAST

Marah! Jokowi Langsung Perintahkan Copot Dirjen Imigrasi dan Bawahannya Jika Tidak Melakukan Perbaikan

Anton atong sugandhi - PANGANDARAN.BROADCAST.CO.ID

Sep 12, 2022 - 18:05



JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada menteri untuk mencopot Dirjen Imigrasi dan bawahannya jika tidak melakukan perbaikan. Ultimatum tersebut ia sampaikan terkait sulitnya investor dan turis untuk mengurus Visa on Arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dengan itu, dia meminta adanya perubahan total dalam pelayanan imigrasi agar lebih mudah dan melayani. Jokowi menyampaikan hal tersebut saat rapat yang khusus membahas VoA dan KITAS di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (09/09/2022).

“Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat KITAS izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol,” tuturnya, seperti dikutip dari Merdeka.

“Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang harus diubah total. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah,” sambungnya.

Kemudian, Jokowi menekankan untuk melihat dari besaran investasinya dalam hal pemberian visa atau KITAS kepada investor.

Kemudian juga soal jumlah lapangan kerja yang terbuka hingga kontribusi terhadap ekonomi serta peningkatan ekspor. Jokowi lantas mencontohkan beberapa negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi atau keahlian khusus. Oleh karena itu, Jokowi ingin pelayanan imigrasi di Indonesia meninggalkan gaya-gaya lama. Dia yakin visa dan KITAS untuk para investor serta tenaga ahli asing akan bisa memberikan manfaat kepada rakyat.

Jokowi pun menegaskan untuk mengganti semua, mulai dari dirjen hingga bawahan yang tidak punya kemampuan untuk berubah.

“Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, baru itu bisa berubah. Kalau ndak, itu enggak akan berubah,” pungkasnya. (***)